

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat pesisir merupakan salah satu kelompok yang memiliki tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kemiskinan di wilayah pesisir pada tahun 2022 mencapai 17,74 juta orang, dengan 3,9 juta orang yang termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah pesisir merupakan 68% dari kemiskinan nasional (Nugraheni, 2023). Masyarakat pesisir sangat bergantung pada sektor kehutanan dan perikanan yang masih menjadi sumber penghasilan utama. Data Badan Pusat Statistik 2024 menunjukkan bahwa terdapat 10.494 desa tepi laut yang sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor tersebut sebagai sumber penghidupan. Fakta ketergantungan ini menunjukkan betapa pentingnya sumber daya alam untuk mendukung ekonomi dan memberi masyarakat peluang kerja (BPS, 2024).

Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor tersebut membuat masyarakat pesisir sangat rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Perubahan lingkungan dalam skala kecil sekalipun dapat secara langsung memengaruhi keberlangsungan mata pencaharian mereka (Ayu *et al.*, 2023). Berbagai tekanan seperti perubahan iklim, penangkapan ikan berlebih, dan degradasi lingkungan menyebabkan penurunan produktivitas sumber daya alam yang pada akhirnya mengancam stabilitas penghidupan mereka (Arianto, 2020).

Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk mendukung penghidupan masyarakat pesisir adalah ekosistem mangrove. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai mencapai 99.083 km, Indonesia memiliki kurang lebih 23% dari total luasan mangrove secara global sehingga menjadikannya sebagai salah satu negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia (Rizaty, 2021). Berdasarkan data terbaru dari Peta Mangrove Nasional 2024, Indonesia tercatat memiliki kawasan mangrove seluas 3.440.464 hektare. Sementara itu, 769.824 hektare di antaranya merupakan wilayah yang dikategorikan sebagai luas potensi habitat mangrove. Penetapan data tersebut dituangkan dalam Keputusan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2025.

Gambar 1.1
Jumlah Desa Tepi Laut Menurut Kegiatan Pemanfaatan Laut



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari hasil Podes 2021 dan 2024
(Diakses pada 28 November 2025 pukul 21.25 WIB)

Sumber daya laut, termasuk ekosistem mangrove dapat menjadi peluang besar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Mangrove memiliki peranan ekologis, ekonomi, dan sosial yang krusial bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia tercatat memiliki 6.757 desa tepi laut yang memiliki mempunyai mangrove. Mangrove menyediakan

berbagai jasa yang menjadi sumber pangan dan penopang utama mata pencaharian masyarakat pesisir. Mangrove juga berkontribusi besar dalam mitigasi perubahan iklim karena kemampuannya untuk menyimpan karbon dalam jumlah yang tinggi (Nurhati & Murdiyarso, 2022).

Dari segi sosial ekonomi, mangrove dikategorikan ke dalam empat jenis jasa ekosistem. Pertama, jasa penyediaan ekosistem, yang mencakup pasokan kayu bakar, bahan bangunan, ikan, udang, dan kepiting. Kedua, jasa pengaturan, yang mencakup pengendalian abrasi dan penyerapan karbon. Ketiga, jasa pendukung, yang mencakup peran mangrove sebagai habitat untuk berbagai biota dan bagian dari siklus hara. Terakhir adalah jasa budaya, yang mencakup nilai sosial, adat, dan wisata (Marlianingrum *et al.*, 2021).

Berbagai manfaat mangrove kini terancam oleh meningkatnya tekanan terhadap kawasan pesisir. Perluasan pembangunan, alih fungsi lahan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol menyebabkan degradasi mangrove di banyak wilayah. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebutkan bahwa Indonesia kehilangan mangrove sebesar 19.501 hektare setiap tahunnya (Riyandi, 2025). Dilansir dari Kompas, 60% lahan mangrove di Indonesia mengalami kerusakan dan 80% kerusakan tersebut di antaranya disebabkan oleh alih fungsi lahan yang mayoritas untuk keperluan tambak (Pristiandaru, 2025). Situasi ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan upaya pelestarian yang seharusnya berjalan secara beriringan (Tuna *et al.*, 2025).

Tantangan tersebut juga diperparah oleh rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan mangrove. Banyak masyarakat

yang belum menyadari bahwa mangrove merupakan salah satu ekosistem penting sekaligus berpotensi mendukung perekonomian, baik dari wisata maupun produk berbasis mangrove (Romli & Purwanto, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove masih belum mencapai kondisi yang optimal. Misalnya, studi di Desa Purworejo, Kabupaten Lampung Timur menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove yang terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan masih tergolong rendah dengan skor partisipasi total mencapai sekitar 77% (Wati *et al.*, 2023). Penelitian di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa 62% masyarakat tidak terlibat aktif dalam penegakan hukum perlindungan mangrove meskipun memiliki sikap positif terhadap perlindungan hutan ini (Arwaty & Lullulangi, 2023).

Sumber daya manusia di sektor kelautan ini belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan industri karena mereka kekurangan pelatihan dan pendidikan khusus. Selain itu, pemahaman mereka mengenai aspek manajerial dan pengelolaan usaha juga masih terbatas sehingga menghambat perkembangan ekonomi masyarakat pesisir (BPS, 2024). Hal ini bertolak belakang karena keberhasilan pengelolaan mangrove sangat bergantung pada partisipasi komunitas lokal sebagai pihak yang hidup dan beraktivitas langsung di wilayah pesisir. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran ekologis serta pemberdayaan masyarakat menjadi elemen krusial untuk mewujudkan ekosistem pesisir yang lebih kuat dan berkelanjutan (Tuna *et al.*, 2025).

Untuk meningkatkan pemahaman, kehadiran aktor pendamping yang mampu menjembatani program pemberdayaan sebagai upaya pelestarian sangat diperlukan. Pemberdayaan merupakan proses yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, termasuk memiliki akses terhadap sumber daya produktif yang dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan juga menekankan pentingnya kemampuan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka (Sukmana, 2021). Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan produktivitas, penyediaan kesempatan usaha, maupun pemberian bantuan modal sebagai stimulus. Keberhasilan pemberdayaan memerlukan adanya kerja sama dan kemitraan yang erat antarpihak agar potensi masyarakat dapat berkembang (Putri *et al.*, 2020).

Proses pemberdayaan masyarakat memerlukan aktor yang berfungsi memberikan edukasi, pendampingan, serta memastikan masyarakat memiliki kapasitas, pengetahuan, dan dukungan yang memadai untuk terlibat aktif. Salah satu aktor yang dapat berperan adalah *Non-Governmental Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). NGO adalah organisasi non-pemerintah yang dibentuk secara sukarela oleh individu maupun kelompok masyarakat. Lembaga ini bergerak pada bidang tertentu dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat sekaligus berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah (Ananda & Nugoro, 2024).

Sebagai sektor ketiga, NGO mempunyai karakteristik yang bersifat swakelola, privat, nirlaba, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Karakteristik tersebut memungkinkan NGO bergerak lebih fleksibel tanpa terikat kepentingan politik maupun motif ekonomi. Fleksibilitas ini menjadikan NGO mampu menyuarakan kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat yang kerap terabaikan dan kurang beruntung (Lewis & Kanji, 2021, p. 11).

Salah satu contoh NGO yang bergerak pada bidang fokus ekosistem mangrove dan masyarakat pesisir adalah Kawungpitu Institute. Kawungpitu Institute bertujuan untuk mewujudkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat melalui tiga pilar utama, yaitu pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, penguatan kapasitas komunitas, serta peningkatan ketahanan komunitas dalam menghadapi tekanan dan krisis iklim. Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, Kawungpitu Institute menjalankan berbagai programnya dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) dalam setiap intervensi yang dilakukan.

Menurut Chambers dan Conway, penghidupan mencakup kapabilitas, berbagai aset, serta aktivitas pencarian nafkah. Suatu penghidupan dianggap berkelanjutan apabila mampu bertahan dan bangkit dari berbagai tekanan atau guncangan, serta dapat meningkatkan kemampuan dan aset yang dimiliki tanpa merusak atau mengurangi kualitas sumber daya alam (Scoones, 2024, p. 9).

Penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) merupakan konsep yang membantu masyarakat memahami sejauh mana keberlanjutan aset yang mereka

miliki atau kelola (Pradnyaswari *et al.*, 2022). Untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka, aset ini digunakan untuk menjalankan mata pencaharian, termasuk sumber daya alam dan lingkungan, sosial, keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya infrastruktur atau fisik. Kelima aset ini digunakan oleh masyarakat untuk menentukan strategi dan hasil penghidupan mereka sendiri agar mampu mengurangi tingkat kerentanan rumah tangga atau masyarakat terhadap berbagai ancaman (Putra & Suprianto, 2020).

Gambar 1.2
Sustainable Development Goals



Sumber: <https://sdgs.un.org/goals>
(Diakses pada 30 November 2025 pukul 19.25 WIB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama yang berkaitan dengan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) (Hendratmi *et al.*, 2024). SDGs merupakan inisiatif global yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai upaya bersama untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. SDGs menjadi bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang dibuat sebagai kerangka internasional dalam menghadapi

beragam tantangan dunia, seperti kemiskinan, ketidakadilan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan isu keberlanjutan lainnya (Aji & Kartono, 2022).

SDGs disusun untuk menjawab berbagai persoalan strategis yang kompleks, termasuk perlunya peran aktif sektor swasta dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menekan angka kemiskinan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Melalui kerangka ini, SDGs menekankan upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat inovasi teknologi sebagai pendorong kemajuan (Hendratmi *et al.*, 2024).

Kawungpitu Institute memfokuskan kegiatannya pada pengembangan program yang mendukung terwujudnya penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) bagi masyarakat pesisir. Hal ini berkesinambungan dengan beberapa poin SDGs yaitu SDG 1 Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*), SDG 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 13 Aksi Iklim (*Climate Action*), SDG 14 Menjaga Ekosistem Laut (*Life Below Water*), dan SDGS 17 Kemintran untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*).

Fokus Kawungpitu Institute pada masyarakat pesisir menjadi penting karena kelompok ini termasuk yang paling rentan terhadap berbagai tekanan sosial dan ekonomi, terutama karena tingginya ketergantungan mereka pada sumber daya laut. Kerentanan tersebut terlihat dari pendapatan yang tidak stabil akibat fluktuasi hasil tangkapan ikan, terbatasnya akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan, hingga minimnya infrastruktur pendukung seperti transportasi dan komunikasi (Pelu, 2024).

Rendahnya literasi teknologi dan informasi turut mempersempit kesempatan masyarakat pesisir untuk memperoleh alternatif mata pencaharian maupun beradaptasi terhadap dinamika lingkungan dan perubahan iklim. Dengan kondisi tersebut, diperlukan pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berakar pada potensi lokal guna memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir (Pelu, 2024). Upaya penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir inilah yang kemudian melahirkan program SUAR (Scaling-Up Anambas Rural Smallholder), sebuah inisiatif dari Kawungpitu Institute yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai sumber penghidupan alternatif yang lebih tahan terhadap tekanan ekonomi maupun perubahan lingkungan.

Lokasi program SUAR adalah Desa Langir di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Desa ini memiliki potensi ekosistem mangrove yang besar, tetapi masih berhadapan dengan berbagai persoalan dalam pemanfaatannya. Menurut Kemendagri dan Ombudsman RI, Kabupaten Kepulauan Anambas dikategorikan sebagai wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Status 3T ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tantangan pada aspek kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur dasar, serta kapasitas fiskal yang memerlukan perhatian dan dukungan lebih intensif (Imaduddin, 2025).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024, luas kawasan mangrove yang berada di wilayah Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan perairan sekitarnya tercatat mencapai 766,32

hektare. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kawungpitu Institute, sebaran mangrove di Desa Langir memiliki luas sekitar 11,7 hektare. Sebaran tersebut ditampilkan secara visual pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Peta Sebaran Mangrove di Desa Langir



Sumber: Kawungpitu Institute
(Diakses pada 25 Desember 2025 pukul 14:02 WIB)

Secara ekologis, Desa Langir memiliki kawasan mangrove yang cukup luas. Akan tetapi, pemanfaatannya masih belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Kawungpitu Institute dengan masyarakat Desa Langir, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih memandang mangrove sebagai tanaman penghambat. Akibatnya, mangrove kerap ditebang dan dialihfungsikan menjadi berbagai jenis infrastruktur, seperti dermaga, lapangan, dan pemukiman. Hal ini juga dijelaskan melalui wawancara pra-riset dengan salah satu fasilitator program SUAR.

“Masyarakat Desa Langir menganggap bahwa mangrove itu adalah taman yang tidak berguna. Mereka *kan* bikin pemukiman di dekat mangrove, sehingga mau nggak mau mereka ya jadi bagian dari ekosistem mangrove, *kan*? Nah di mangrove *tuh* ada yang namanya agas. Agas itu kayak nyamuk, mereka *tuh* nggak nyaman, ya *gatel lah*. Jadi yaudah, mereka potong aja mangrovenya,” (Hasil pra-riset wawancara dengan BJ pada 25 Desember 2025).

Praktik penebangan mangrove tersebut berdampak pada menurunnya kualitas habitat dan berkurangnya ketersediaan kepiting bakau sebagai salah satu indikator utama kesehatan ekosistem mangrove sekaligus sumber daya ekonomi potensial bagi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh wawancara peneliti pada pra-riset.

“Bahkan, pernah ada kasus penebangan mangrove buat lapangan bola, karena mereka (masyarakat Desa Langir) *nganggap mangrove tuh* nggak berguna lah, yaudah, ditebang aja karena saat itu mangrove nggak jadi pertimbangan apa-apa. Baru, setelah program SUAR berjalan, ternyata lapangan itu adalah tempat anak-anak kepiting hidup. Mereka (masyarakat Desa Langir) baru sadar kayak, ‘*aduh, tau gitu dulu nggak usah ditebang karena ternyata kepitingnya bisa dibudidayain*’.” (Hasil pra-riset wawancara dengan BJ pada 25 Desember 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, program SUAR (Scalling-Up Anambas Rural Smallholder) dirancang dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui optimalisasi pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan, SUAR mengimplementasikan dua pendekatan utama. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai dan potensi ekosistem mangrove, termasuk manfaat ekologis dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan. Kedua, penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola ekonomi berbasis mangrove, seperti pengembangan *crab estate* dan budidaya lebah madu tanpa sengat sebagai sumber penghidupan alternatif. Melalui pendekatan ini, SUAR bertujuan agar masyarakat mampu memanfaatkan mangrove yang berorientasi pada konservasi dan peningkatan pendapatan ekonomi.

Kemampuan NGO Kawungpitu Institute untuk berkomunikasi dengan masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan seperti SUAR. Strategi yang baik diperlukan untuk membangun komunikasi yang efektif

ini. Pada dasarnya, strategi adalah kombinasi dari perencanaan dan manajemen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, menurut Effendy (2017), strategi harus menunjukkan cara langkah operasional dilakukan, bukan hanya memberi petunjuk.

Strategi komunikasi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara sadar dan terarah oleh suatu aktor komunikasi di ruang publik untuk mewakili kepentingan sebuah organisasi atau entitas tertentu dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi mencakup penyusunan pesan yang terstruktur serta respons yang disiapkan secara sistematis. Di dalamnya, komunikasi disampaikan melalui pesan-pesan yang spesifik, disusun untuk menghasilkan efek atau capaian tertentu, dan menjadi bagian dari rangkaian strategi komunikasi yang lebih luas. Proses ini juga diarahkan kepada kelompok pemangku kepentingan tertentu serta dapat memanfaatkan berbagai saluran dan bentuk komunikasi yang berbeda (Holtzhausen *et al.*, 2021).

Programs pemberdayaan dan pembangunan masyarakat seringkali tidak mencapai hasil yang optimal karena tidak didukung oleh perencanaan komunikasi yang memadai. Komunikasi memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan karena melalui proses komunikasi yang terarah, masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat memahami tujuan, arah, manfaat, serta keberhasilan program yang dilaksanakan (Cangara, 2017, p. 196).

Hasil pengamatan awal menunjukkan adanya sejumlah permasalahan komunikasi dalam pelaksanaan Program SUAR, seperti persoalan perbedaan latar belakang pendidikan, tingkat literasi masyarakat, serta variasi cara pandang

masyarakat terhadap ekosistem mangrove. Perbedaan tersebut berpengaruh pada penerimaan masyarakat terhadap pesan program dan berdampak pada munculnya sikap skeptis serta rendahnya kepercayaan pada tahap awal sosialisasi, sehingga proses penyampaian informasi dan penguatan partisipasi masyarakat pada awalnya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini disampaikan oleh fasilitator SUAR dalam wawancara pra-riset sebagai berikut.

“Saat mensosialisasikan pertama kali, masyarakat masih anggap mangrove nggak berguna, *kan*. Masih ada *counter-counter* dari masyarakat kayak, ‘*ngapain, kepiting mah nggak usah dibudidayain, orang kita bisa ngambil*’. Sehingga, yang dilakukan kemudian adalah bagaimana kita bisa membesarkan kepiting itu agar lebih mudah dipanennya, kalau di laut *kan* susah ngambilnya, *effort*. Jadi waktu sosialisasi, kesulitan awalnya masih diremehin, masih nggak percaya *lah*, kayak, *ngapain sih?*” (Hasil pra-riset wawancara dengan BJ pada 25 Desember 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi memiliki peran yang penting dan perlu ditelaah secara lebih mendalam untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program SUAR. Strategi komunikasi merupakan langkah awal yang krusial dalam pelaksanaan komunikasi lingkungan karena berbagai faktor pendukung maupun penghambat perlu dipertimbangkan agar tujuan komunikasi dapat tercapai (Nasas & Dirgantara, 2025). Oleh karena itu, untuk merancang program pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan seorang perencana komunikasi untuk mendekati masyarakat. Proses ini menuntut penguasaan keterampilan komunikasi interpersonal maupun komunikasi kelompok agar pesan program dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan secara optimal (Cangara, 2017, p. 197).

Saat mengelola mangrove, strategi komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong partisipasi masyarakat pesisir (Romli & Purwanto, 2024). Strategi komunikasi yang efektif

tidak dapat dilakukan secara satu arah atau bersifat *top-down*, melainkan harus partisipatif dan disesuaikan dengan konteks lokal (Hidayat, 2025). Hal ini turut diterapkan oleh Kawungpitu Institute terapkan dalam program SUAR, sebagaimana dikatakan pada wawancara pra-riset.

“Fasilitator pendampingan itu bagian dari strategi komunikasi yang dilakukan. Contohnya Bayu (fasilitator program SUAR). Bayu itu memerankan peran penting. Kenapa Bayu *ditaro* di sana ya karena itu strategi komunikasi kita juga agar setiap masyarakat bingung atau apa langsung tanya. Jadi nggak cuman ngurusin program, tapi dia udah jadi bagian masyarakat, bukan hanya melihat dari jauh,” (Hasil pra-riset wawancara dengan BJ pada 25 Desember 2025).

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap konservasi mangrove, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sangat penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kelestarian ekosistem. Komunikasi partisipatif memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, pengetahuan lokal, dan nilai-nilai budaya mereka, yang semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik konservasi lingkungan (Hidayat, 2025). Hal ini sesuai dengan upaya Kawungpitu Institute seperti yang dinyatakan dalam wawancara pra-riset.

“Salah satu pendekatan yang menjadi strategi komunikasi kita adalah Sekolah Lapangan. Sekolah Lapangan rutin tiap minggu, sifatnya mendengar saya lupa, melihat saya ingat, melakukan saya paham. Lewat Sekolah Lapangan mereka akan belajar bersama,” (Hasil pra-riset wawancara dengan BJ pada 25 Desember 2025).

Melalui pendekatan komunikasi yang mengutamakan kearifan lokal dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan akan muncul rasa kepemilikan terhadap kawasan mangrove tersebut, sehingga mendorong warga untuk turut serta dalam upaya konservasi. Pengelolaan yang dibangun di atas pemahaman bersama ini juga

berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada ekosistem mangrove (Romli & Purwanto, 2024). Pendekatan ini tercermin dalam pelaksanaan program SUAR yang sebagaimana diungkapkan dalam wawancara pra-riset.

“Kalau di SUAR, kita ada tahap *visioning*, kita ngumpulin, apa *sih* harapan dan mimpi masyarakat terhadap mangrove di Desa Langir, walau kita udah ada rencana mau budidaya lebah dan kepiting, kita tetap dengerin apa maunya masyarakat soal pengelolaan mangrove ini, ada harapan nggak, *sih*?” (Hasil pra-riset wawancara dengan BJ pada 25 Desember 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan Kawungpitu Institute melalui Program SUAR. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep Strategi Komunikasi Falkheimer dan Heide yang meliputi analisis situasi, tujuan dan sasaran, audiens dan pemangku kepentingan, pesan dan konten, media komunikasi, serta evaluasi dan pengukuran.

Penelitian ini dipilih karena masih terdapat kesenjangan antara potensi ekosistem mangrove sebagai sumber penghidupan berkelanjutan dengan rendahnya partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaannya, yang salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya informasi mengenai manfaat ekosistem tersebut. Kajian mengenai strategi komunikasi NGO dalam program pemanfaatan mangrove juga masih relatif terbatas dibandingkan penelitian terdahulu yang berfokus pada kebijakan pemerintah atau humas. Program SUAR yang dilakukan oleh Kawungpitu Institute dipilih karena memiliki pendekatan pemberdayaan berbasis *sustainable livelihood* yang menempatkan komunikasi partisipatif sebagai elemen utama perubahan masyarakat pesisir mengingat masyarakat tersebut menghadapi

tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi. Situasi ini menegaskan perlunya strategi komunikasi yang tepat agar dapat memastikan bahwa pesan-pesan mengenai nilai ekologis dan manfaat ekonomi hutan mangrove dipahami, diterima, dan diimplementasikan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait pemberdayaan masyarakat dalam program SUAR yang dilaksanakan oleh Kawungpitu Institute, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengelolaan mangrove masih rendah karena sebagian masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap mangrove, yaitu menganggap mangrove sebagai tanaman pengganggu dan tidak menguntungkan sehingga edukasi mengenai fungsi ekologis dan potensi ekonomi ekosistem mangrove belum sepenuhnya dipahami secara benar untuk kebutuhan mereka.
2. Akses dan informasi mengenai potensi ekonomi mangrove masih terbatas, sehingga pesan tentang alternatif mata pencaharian berbasis mangrove belum tersampaikan kepada masyarakat pesisir.
3. Diperlukan strategi komunikasi yang tepat dan terencana oleh sebuah organisasi, mulai dari analisis situasi, tujuan dan sasaran, perumusan pesan, pemilihan media, hingga evaluasi, agar pesan mengenai konservasi mangrove dapat dipahami, diterima, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaannya.

1.3 Keunikan Penelitian

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah atau praktik hubungan masyarakat, keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap strategi komunikasi yang diterapkan oleh organisasi non-pemerintah. Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi dalam konteks program pemberdayaan berbasis mata pencaharian berkelanjutan, sehingga menawarkan perspektif baru di bidang studi komunikasi. Selain itu, ini merupakan penelitian pertama yang secara khusus membahas strategi komunikasi dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kawungpitu Institute.

1.4 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk membuat penelitian lebih terfokus dan untuk menghindari penyertaan aspek-aspek lain yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis strategi komunikasi, mulai dari analisis situasi, perumusan tujuan dan sasaran, pemilihan target audiens, penyampaian pesan, pemilihan media, hingga evaluasi yang diterapkan oleh NGO Kawungpitu Institute dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
2. Penelitian ini hanya menganalisis bagaimana strategi komunikasi tersebut direncanakan dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan program, yaitu membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh NGO Kawungpitu Institute dalam program pemberdayaan ekosistem mangrove untuk mendukung penghidupan berkelanjutan masyarakat pesisir?

1.6 Fokus Penelitian

Permasalahan penelitian ini berangkat dari kondisi masyarakat pesisir Desa Langir yang sebelumnya memandang ekosistem mangrove sebagai wilayah yang tidak memiliki nilai guna ekonomi, bahkan dianggap mengganggu aktivitas masyarakat. Persepsi tersebut mendorong berbagai praktik perusakan dan alih fungsi kawasan mangrove yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan pesisir serta hilangnya potensi ekonomi jangka panjang bagi masyarakat setempat. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap fungsi ekologis dan potensi ekonomi ekosistem mangrove.

Fenomena tersebut berkaitan dengan persoalan struktural yang lebih luas di wilayah pesisir. Secara nasional, kawasan pesisir masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, di mana pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir mencapai 17,74 juta jiwa atau sekitar 68% dari total kemiskinan nasional (Nugraheni, 2023). Di sisi lain, Indonesia memiliki ekosistem mangrove yang sangat luas, yakni sekitar 3.440.464 hektar, yang menyimpan potensi ekologis dan ekonomi strategis apabila dikelola secara berkelanjutan. Ketimpangan antara besarnya potensi sumber daya dan pemanfaatannya menunjukkan perlunya upaya intervensi yang lebih terarah.

Dalam konteks tersebut, pesan mengenai manfaat ekologis dan potensi ekonomi mangrove membutuhkan pendekatan komunikasi yang mampu menggeser cara pandang masyarakat, membangun pemahaman bersama, serta menumbuhkan kepercayaan. Strategi komunikasi yang terencana dan kontekstual menjadi penting agar pesan program tidak hanya disampaikan, tetapi juga diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Kawungpitu Institute hadir sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) yang mendampingi program pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan ekosistem mangrove dengan pendekatan penghidupan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat dalam program pengelolaan ekosistem mangrove untuk mendukung penghidupan berkelanjutan (studi program SUAR tahun 2024-2025 di Kawungpitu Institute)?

1.7 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan, masyarakat pesisir merupakan kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, angka kemiskinan di wilayah pesisir mencapai 17,74 juta jiwa atau sekitar 68% dari total kemiskinan nasional (Nugraheni, 2023). Padahal, Peta Mangrove Nasional 2024 menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi ekosistem mangrove seluas 3.440.464 hektare yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi jika dikelola secara berkelanjutan. Namun, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove menjadi tantangan utama dalam pemanfaatan potensi tersebut.

Untuk merespons kondisi tersebut, Kawungpitu Institute sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) melaksanakan program SUAR sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ekosistem mangrove. Keberhasilan program pemberdayaan ini sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang diterapkan dalam proses penyampaian pesan untuk membangun pemahaman, mengubah persepsi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat dalam program pengelolaan ekosistem mangrove untuk mendukung penghidupan berkelanjutan (studi program SUAR tahun 2024-2025 di Kawungpitu Institute).

1.8 Manfaat Penelitian

1.8.1 Manfaat Penelitian Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan dimensi Strategi Komunikasi Falkheimer dan Heide dalam konteks program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan perspektif, teori, maupun pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memperluas pengembangan keilmuan di bidang komunikasi.

1.8.2 Manfaat Penelitian Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, terutama organisasi non-pemerintah dan lembaga pemerintah yang merancang dan melaksanakan program pemberdayaan. Temuan penelitian ini dapat membantu para pemangku kepentingan tersebut untuk memahami bagaimana strategi komunikasi yang tepat dapat mendukung keberhasilan program pemberdayaan di kalangan masyarakat sasaran.



Intelligentia - Dignitas